

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Pembangunan

Todaro, M., Smith, I. I., Stephen, C. (2012). Pembangunan ekonomi dilihat dari kaitanya pada perubahan yang terencana pada struktur produksi serta kesempatan kerja. Didalam proses inilah peranan dari sektor pertanian akan menurun yang disebabkan dibukanya peluang untuk memanfaatkan sektor manufaktur serta jasa, oleh karna itu yang selama ini terjadi konsep pembangunan selalu berfokus pada proses industrialisasi yang pesat, yang merugikan pembangunan pertanian serta pedesaan.

Pembangunan harus memiliki sifat multidimensi yang melibatkan bermacam perubahan pada struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itulah hendaknya pembangunan mencerminkan perubahan pada sistem sosial yang sesuai dengan beragam kebutuhan dasar dan upaya menumbuhkan aspirasi pada individu dan kelompok sosial pada sistem tersebut, pembangunan hendaknya menjadi upaya merubah kondisi kehidupan yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin.

Pembangunan pada masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan yang *pertama*; ialah peningkatan ketersediaan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan yang, *kedua*; ialah peningkatan standar hidup, bukan hanya peningkatan pendapatan saja namun juga tersedianya lapangan pekerjaan yang

lebih banyak, dan pendidikan yang lebih baik, *ketiga*; perhatian besar terhadap nilai nilai budaya dan kemanusiaan.

Sudharto P. Hadi. (2000). Pembangunan ditujukan untuk melakukan perubahan yang berdasarkan pandangan tertentu dengan melihat kejadian dari sejarah masa lalu dan realitas yang ada, serta kebijakan dari pihak pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keputusan dalam pembangunan. Pembangunan sendiri memiliki dua artian yang pertama ialah yang berorientasi pada pembangunan serta ekonomi yang berfokus pada masalah produksi dan penggunaan sumber daya yang ada, yang kedua pembangunan yang berorientasi pada perubahan distribusi barang dan peningkatan pada hubungan sosial, yang mana pendistribusian perubahan pada struktur masyarakatnya dihitung berdasarkan berkurangnya diskriminasi, eksploitasi, meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari total keuntungan pembangunan pada masyarakat.

Supardi. I, (1994), menjelaskan bahwa pembangunan ialah proses sosial yang integral dan bersifat menyeluruh, baik pada perubahan sosial maupun berupa pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada pelaksanaannya, proses pembangunan berjalan melewati siklus produksi guna mencapai konsumsi dan pemanfaatannya pada SDA, SDM, permodalan, sumber keuangan, yang mana semuanya perlu ditingkatkan guna tercapainya tujuan dan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Peningkatan pembangunan harus sejalan dengan pemeliharaan kestabilan ekonomi, ekologi, dan sosial yang mana semuanya harus berjalan bersama. Dapat disimpulkan secara singkat pembangunan sebaiknya bersifat terpadu antara sosial, ekonomi, dan ekologi yang mana pembangunan

tersebut meramalkan sebelumnya pengaruh dari aktivitas pembangunan tersebut pada lingkungan alam yang luas.

Menurut Tjahja S, (2000), pembangunan ialah perubahan terencana dari keadaan yang kurang menguntungkan ke keadaan yang lebih baik, oleh karena itu konsep pada pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan pendekatan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karna kodratnya masyarakat selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga pendekatannya difokuskan pada lingkungan sosial ekonomi.

#### B. Pengertian Lahan

Lahan ialah salah satu sumberdaya dari pembangunan yang memiliki karakteristik luasnya relatif tetap, dan mempunyai sifat fisik yang spesifik seperti jenis batuan, kandungan mineral dan lain sebagainya. Menurut Balai Penelitian Tanah (2003), lahan ialah bagian dari luas lahan dimana lingkungan fisik seperti tanah, topografi dan keadaan vegetasi alami yang meliputi secara potensial akan mempengaruhi penggunaan lahan. Agar kelestarian sumber daya lahan terjamin maka dalam pemanfaatannya sendiri lahan memerlukan arahan yang sesuai dengan karakteristik dan sifat fisiknya tersebut.

Menurut Arsyad, S. (1989), lahan ada karna campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan berupa materil serta spiritual yang mana hampir semua kegiatan dan aktivitas manusia memanfaatkan penggunaan lahan, semakin banyak aktivitas manusia yang dilakukan maka lahan sebagai sumber daya akan semakin berkurang.

Irawan, B. (2005). Keberadaan lahan sawah memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi, yang mana sebagian besar manfaat tersebut bersifat komunal, jika terjadi konversi lahan sawah maka kerugian yang di dapatkan akan dirasakan oleh masyarakat luas dari pada sebagian kecil masyarakat pemilik lahan. Bagi ketahanan pangan, konversi lahan juga dapat menimbulkan dampak yang lebih merugikan daripada faktor lain yang mana menyebabkan turunya produksi tani seperti kekeringan, atau serangan hama, hal ini karna berkurangnya produksi pangan yang disebabkan oleh konversi lahan sawah yang tidak mudah untuk dipulihkan mengingat konversi lahan sawah umumnya bersifat *irreversible* sementara upaya lain untuk menetralsir penurunan produksi pangan tersebut semakin terkendala oleh masalah anggaran pembangunan keterbatasan sumberdaya dan inovasi teknologi.

Harsono dalam Winarso, B. (2012), menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Penguasaan pada pedesaan di Jawa yang dilakukan secara adat dapat dilihat dari bentuknya yakni tanah yasan dan tanah milik komunal, tanah yasan ialah tanah yang didapatkan dari pembukaan kawasan hutan atau tanah liar untuk digarap, tanah tersebut berasal dari pembukaan lahan yang mereka lakukan sendiri atau nenek moyangnya, dalam UUPA, tanah ini diakui sebagai tanah milik perorangan. Sedangkan pada tanah milik komunal penguasaanya dimiliki dan dikuasai oleh pihak desa, tanah ini digolongkan menjadi tiga, yakni tanah gogolan (norowito), tanah titisoro dan tanah bengkok, tanah gogolan adalah tanah milik desa yang hak pemanfaatannya dibagi-bagi kepada sejumlah petani secara tetap maupun bergiliran tergantung adat masing-masing daerah, tanah titisoro adalah tanah kas

desa yang secara berkala disewakan, dan hasilnya menjadi kas desa, tanah bengkok adalah tanah milik desa yang ditujukan bagi kepala dan aparat desa sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan

Pada penelitian yang sama disebutkan ada delapan jenis status hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA, yaitu (a) hak milik, hak milik lahan adalah merupakan hak turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas sebidang tanah baik yang berasal dari warisan, pembelian atau hibah dari orang lain. (b) hak guna usaha, (c) hak guna bangunan, (d) hak pakai, (e) hak sewa, (f) hak membuka tanah, (g) hak memungut hasil hutan dan (h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang bersifat sementara yaitu hak penggunaan tanah bukan milik sendiri, hak yang bersifat sementara ialah hak gadai, hak numpang dan sewa, selain itu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 tahun 1960) dijelaskan bahwa hak atas tanah yang diakui adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan, serta hak yang sifatnya sementara seperti hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Dari pengertian sebelumnya dapat di ambil kesimpulan bahwa lahan ialah tanah yang telah di peruntukan untuk manusia untuk di olah demi memenuhi kebutuhan hidup manusia, keberadaan lahan sangat di butuhkan bagi manusia, oleh karna itu manusia akan selalu mengolah lahan yang ia miliki guna menjamin kelangsungan hidupnya.

### C. Pengertian Penggunaan Lahan

Sutanto. (1986), penggunaan lahan ialah segala jenis kegiatan pemanfaatan lahan oleh manusia baik itu menjadi lahan persawahan atau pemukiman hingga rumah makan, rumah sakit, kuburan, semuanya tergantung pada aktivitas dan tujuan dari masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan dari penggunaan lahan muncul dari perubahan antara jumlah penduduk dan jumlah dari luas lahan yang ada pada daerah pinggiran kota atau pedesaan penggunaan lahan biasanya di gunakan untuk pertanian karna sifat hidupnya yang homogen agraris sedangkan pada wilayah kota di gunakan sebagai industri, perumahan, perkantoran hal ini di karnakan sifat hidup heterogen matrealistis.

Lahan pada penggunanya digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni industri, pemukiman, komunikasi, tranportasi, jasa, budaya, perdagangan, hiburan, dan penambangan dari sumber daya alam. Seiring dengan peningkatan aktivitas pada lahan maka penggunaan dari lahan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan motivasi dan apa yang di butuhkan oleh manusia yang menempatnya, perubahan yang dinamis ini terjadi seiring dengan penambahan aktivitas penduduk, aksesibilitas dari lahan sendiri ialah faktor yang melengkapi satu sama lainnya antara pemanfaatan penggunaan lahan yang nantinya akan menentukan nilai ekonomi dari suatu lahan sendiri.

Arsyad, S. (1989). Penggunaan lahan (*land use*) dikatakan sebagai bentuk campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa materi maupun spiritual, dalam pemanfaatanya sendiri penggunaan lahan di bagi menjadi dua yakni penggunaanya pada lahan pertanian dan non pertanian, pada pertanian

sendiri berupa persawahan, perkebunan ladang, dan hutan produksi sedangkan pada pemanfaatan non pertanian berupa pemukiman perkotaan dan pedesaan, industri, rekreasi, dan lain sebagainya.

Lopulisa, C. (1995). Di Indonesia penggunaan lahan memiliki tujuan umum yaitu demi menjamin ketahanan pangan, yang menjadi sumber devisa bagi pembangunan untuk pemukiman dan sarana serta prasarana fasilitas umum. Faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan di Indonesia adalah sifat fisik lahan (iklim, topografi, drainase, sifat fisik, dan kimia tanah ) kondisi dari faktor budaya, ekonomi serta kebijakan pemerintah memiliki kontribusi yang besar juga menurut waktu dan ruang.

#### D. Pengertian Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan dapat di artikan sebagai perubahan fungsi pada suatu lahan dalam jangka waktu yang berbeda beda, adapun faktor yang mempengaruhi perubahannya ialah faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik mempengaruhi pola perubahan lahan karna adanya kebijakan yang di ambil oleh pengambil keputusan, sedangkan faktor ekonominya dikarnakan perubahan pendapatan serta pola konsumsi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang semain meningkat sehingga terjadilah alih fungsi lahan.

Menurut Nasoetion, L., J. Winoto. (1996), ada dua faktor yang menentukan alih fungsi lahan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pertama ialah sistem kelembagaan dari hasil pengembangan masyarakat atau pemerintah, yang kedua sistem non kelembagaan yang alami terbentuk pada masyarakat, dari sistem

kelembagaan yang di kembangkan oleh pemerintah dan masyarakat maka akan di presentasikan dalam bentuk terbitnya beberapa peraturan yang menyangkut dengan konservasi lahan.

Sabari, Y. H. (2000). Perubahan yang kompetitif pada wilayah pinggiran kota dapat diubah ketika pemerintah masuk kedalamnya dan melakukan intervensi dalam sistem perencanaan dari penggunaan lahan yang telah di aplikasikan dalam proses lain fungsi lahan di wilayah pinggiran kota, antara lain:

1. Meningkatkan harga dari lahan
2. Meningkatkan harga dan biaya dari perumahan
3. Meningkatkan gejala dari spekulasi lahan
4. Meningkatkan gejala dari fragmentasi lahan

Di Jawa pada jangka waktu 1987 sampai 1993 terjadi alih fungsi lahan mencapai 22.000 ha, untuk konversi lahan sawah sekitar 100.000 ha sampai akhir 2000. Besarnya luas alih fungsi lahan dapat berpengaruh pada ketahanan pangan. Alih fungsi lahan memiliki lima faktor yang mempengaruhi antara lain, perubahan perilaku masyarakat, hubungan antara pemilik dan lahanya pengambilan keputusan pemecahan lahan, dan apresiasi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, dengan asumsi bahwa pemerintah adalah abdi dan pengayom bagi masyarakat seharusnya pemerintah dapat memposisikan diri sebagai pengendali alih fungsi lahan.

#### E. Pengertian Dampak

Didalam Undang-Undang mengenai lingkungan hidup No. 23 Tahun 1997, dipaparkan bahwa dampak terjadi karna adanya pergeseran lingkungan dikarenakan

adanya kegiatan. dikatakan bahwa investasi atau usaha dalam proses pembangunan memiliki kemampuan yang berpotensi berdampak pada lingkungan, pada pembangunan dampak ditentukan oleh : (a) banyaknya manusia yang terdampak; (b) luas wilayah terdampak; (c) jangka waktu dampak itu terjadi; (d) Intensitas dampak; (e) luas komponen dari lingkungan yang terdampak ; (f) Sifat kumulatif dampak; (g) Berbalik atau tidaknya dampak.

Dalam Yuli S.S. (1996), pada pembangunan sendiri dampak yang dihasilkan ada yang bersifat primer dan sekunder, dampak primer berdasarkan perubahan langsung yang terjadi dikarenakan pembangunan tersebut seperti efeknya pada lingkungan, dampak sekunder adalah yang ada dan setelah terjadinya dampak primer atau dapat dikatakan sebagai dampak tidak langsung dari adanya dampak primer akibat perubahan lingkungan yang terjadi, pada setiap pembangunan itu sendiri akan memunculkan dampak positif dan negatif yang pasti ada.

Menurut Lubis R. (1997), pada PP No. 50 Th 1993 mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL), dampak yang ada dikarenakan pembangunan yang direncanakan pada lingkungan pada kesatuan wilayah dengan melibatkan satu instansi yang berwenang, konsep dari pembangunan sendiri digunakan sebagai alat untuk menilai kelayakan lingkungan suatu wilayah perencanaan pembangunan yang umumnya berada pada daerah rawan bencana yang mana kajian dari AMDAL nantinya memberikan informasi dan gambaran mengenai wilayah, faktor pendorong, batasan, dan dampaknya pada lingkungan secara fisik maupun sosial ekonomi.

Dari kesadaran adanya dampak yang diperoleh pada kegiatan yang bersangkutan pada lingkungan hidup baik itu jangka pendek serta panjang, maka pemerintah selaku pemegang kuasa menciptakan bermacam peraturan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, karna setiap kegiatan dan usaha diwajibkan melengkapi kajian AMDAL sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 mengenai AMDAL.

Menurut Soemarwoto, O. (2013), untuk dapat menilai dampak dan perubahan yang terjadi pada wilayah yang terkena pembangunan, maka seharusnya ada bahan pembanding yang akan dijadikan sebagai acuan yakni “keadaan sebelum terjadi perubahan” dalam hal ini untuk menganalisis terjadinya dampak ada dua batasan yang penting diperhatikan yakni *pertama*; dampak adanya aktivitas pada lingkungan yang mana menyebabkan perbedaan lingkungan pada saat sebelum dan sesudah adanya aktivitas tersebut, *kedua*; adanya aktivitas pada lingkungan adalah adanya perbedaan antara aspek lingkungan yang diperkirakan muncul ketika aktivitas tersebut ada. Dari beberapa konsep dampak yang dijelaskan diperoleh dari kutipan pada studi AMDAL guna menjadi alat pembantu analisis dan pedoman dalam memperkirakan dampak yang sehubungan dengan penelitian, dampak yang diperkirakan peneliti terjadi pada lokasi penelitian ini adalah terjadi perubahan lingkungan seiring dengan dibangunnya bandara internasional Yogyakarta.

## F. Perubahan Kondisi Sosial Penduduk

Pada masyarakat aspek sosial ekonomi terpengaruhi oleh lingkungan dimana masyarakat tinggal, aspek sosial ekonomi ini menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan yang di geluti, aspek interaksi pada pemukiman antara individu maupun kelompok dalam peningkatan kesejahteraan.

### 1. Perubahan Pola Kepemilikan Lahan

Winarso, B. (2012), Penggunaan akan lahan pertanian dibagi atas dua kategori yaitu lahan sawah dan lahan kering bukan sawah, lahan sawah terbagi 2 kategori yakni lahan irigasi dan lahan non irigasi, lahan irigasi ialah lahan sawah yang memiliki pasokan air yang bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana, sedangkan lahan non irigasi ialah lahan yang memiliki pasokan air yang bukan berasal dari hujan atau sumber lainnya, yang masuk dalam kategori ini ialah lahan sawah lebak, sawah pasang surut, serta sawah tadah hujan.

Kepemilikan ataupun penguasaan lahan ialah faktor penting bagi penduduk di pedesaan dimana kehidupan dipedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian, pemilikan akan lahan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pertanian saja tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya pada masyarakat, pada dasarnya lahan tidak hanya saja memiliki fungsi sebagai aset produktif, namun juga dapat berfungsi menjadi komoditas yang diperjualbelikan yang mana setiap saat dapat berpindah tangan maupun kepemilikan status penguasaannya.

Kondisi ini memberi dampak tidak hanya pada status lahan yang bersangkutan saja, akan tetapi mempengaruhi pada kondisi kehidupan sosial ekonomi pada wilayah masyarakat pedesaan, bagi seorang petani sendiri perubahan akan kepemilikan lahan sangat besar pengaruhnya pada ekonomi keluarga petani, hal tersebut dikarenakan hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah atau munculnya hak kepemilikan maupun hak penguasaan atas sebidang tanah, yang mana hilang dan munculnya hak atas lahan muncul melalui berbagai proses sehingga seseorang dikatakan berhak atau tidak atas lahan, proses ini bisa saja terjadi karena adanya transaksi jual beli, sewa, pembagian hak waris, gadai, hibah, ataupun numpang.

Fenomena dari transaksi jual beli tanah ialah hal yang sudah biasa terjadi pada wilayah pedesaan terutama pada lingkungan desa yang memiliki basis kehidupan agraris, lahan menjadi basis utama dalam menjalankan kegiatan sosial ekonomi, permasalahannya ialah perubahan kepemilikan akan lahan secara langsung atau tidak langsung akan berimplikasi pada masyarakat pedesaan khususnya yang kehilangan haknya atas sebidang tanah, perubahan dari penguasaan lahan ini akan berdampak pada sumber mata pencaharian, dan juga pada status sosial dan bahkan pada kegiatan sehari-hari.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, penguasaan hak milik lahan adalah hak turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas sebidang tanah, baik yang berasal dari warisan, pembelian atau hibah dari orang lain, yang mana secara umum hak kepemilikan tersebut diperkuat dengan bukti hukum tertulis berupa surat atau sertifikat kepemilikan lahan yang sah dan

dikeluarkan melalui lembaga yang menangani masalah pertanahan yang umumnya berasal dari lembaga pertanahan maupun lembaga hukum lainnya yang memiliki hak untuk mengeluarkan surat atau sertifikat kepemilikan lahan.

Pada penelitian Puryantoro, Sulistyaningsih (2012). Lahan yang mulanya berfungsi sebagai media bercocok tanam, lambat laun berubah, perubahan penggunaan untuk pertanian ke nonpertanian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, lambat laun kian meningkat, khusus di Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan di kemudian hari, jika tidak ada antisipasi secara serius, implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan dalam jangka panjang.

## 2. Kesejahteraan Rakyat

Upaya menciptakan kesejahteraan pada masyarakat dapat dikatakan pula sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan tak dapat dihilangkan namun kemiskinan bisa dikurangi, hal inilah yang selama ini terus diupayakan oleh pemerintah.

Todaro, M., Smith, I. I., Stephen, C. (2012), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi; *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai

kemanusiaan; *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan terjadi ketika terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat tercermin dari rumah yang layak, terkecukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, sehingga dapat mengembangkan diri dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Dalam Badan Pusat Statistik (2007), Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga sesuai dengan tingkat hidup, status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Badan Pusat Statistik memberi beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk, indikator tersebut diantaranya menggunakan rasio ketergantungan, dengan menggunakan inkesra (Indikator Kesejahteraan Rakyat), yaitu dengan melihat rasio ketergantungan pada pola

pengeluaran konsumsi rumah tangga berupa pengeluaran konsumsi dan non konsumsi. Menurut BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang tujuannya untuk konsumsi selama periode satu tahun, dikurangi dengan hasil penjualan netto dari barang-barang dan jasa, barang-barang yang memiliki kegunaan ganda, yaitu selain untuk keperluan rumah tangga juga digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha, pembelian dan biaya-biaya harus dialokasikan secara proporsional terhadap masing-masing kegiatan yang dilakukan.

### 3. Interaksi sosial

Pada Soerjono Soekanto. (2004), dijelaskan bahwa interaksi sosial ialah hubungan sosial yang dinamis menyangkut dari individu secara pribadi maupun kelompok itu sendiri, perubahan pada kondisi sosial pada masyarakat muncul karena rasa ingin beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya ataupun karena faktor ekologi, dan di asumsikan bahwa masalah pada perubahan masyarakat ialah hasil dari interaksi dari banyak faktor yang terkait.

Dalam Supriharyono. (2000) pada sekelompok masyarakat aspek sosial ekonomi umumnya di pengaruhi oleh aspek alam dan lingkungan masyarakat tersebut tinggal dan ini juga yang terjadi petani atau buruh petani yang memiliki ritme keseharian yang khas dimana perolehan penghasilan cenderung tak menentu dengan penyebab hasil pertanian yang di peroleh pada jangka panjang dengan resiko gagal panen yang besar, yang terpengaruhi oleh keadaan cuaca, pergantian musim, lingkungan serta bencana alam dan kemudahan lahan yang di garap, ketergantungan pada lahan ini apabila terganggu maka di pastikan

akan memberikan efek pada hidup petani dan keluarganya hal ini pulalah yang membuat petani menyesuaikan kegiatan dan jadwal pertanian dengan melihat estimasi dan resiko yang ada.

Dalam Soerjono Soekanto. (2004), ada beberapa faktor yang mendorong interaksi sosial antara lain:

- a. Praktek imitasi dalam hal ini mengikuti orang lain
- b. Sugesti yang ada ketika individu menyampaikan pandangan yang ia anut, sugesti ini ada ketika si penerima dalam kondisi tidak netral
- c. Kecenderungan seseorang ingin menjadi sama dengan orang lain atau dengan pihak lain
- d. Simpati yakni dimana seseorang memiliki rasa yang sama dengan kondisi dan keadaan orang lain
- e. Empati yaitu simpati mendalam yang mempengaruhi jiwa dan fisik seseorang

Berdasarkan peneliti yang sama, ada dua syarat terjadi interaksi yang *pertama*; Terjadi kontak sosial namun kontak disini tidak selalu diartikan dengan menyentuh atau hubungan fisik karna orang dapat melakukan kontak sosial tanpa menyentuh, *kedua*; Komunikasi ialah cara menyampaikan informasi ke pihak lain untuk mencapai tujuan yang sama.

#### 4. Konflik Pemanfaatan Lahan

Konflik merupakan keadaan yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai upaya menampakan dan menjelaskan perbedaan antara dua belah pihak, perbedaan tersebut dapat

berupa perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-nilai, budaya, suku, kelompok, ras dan agama.

Dalam bukunya Susan, N. (2009), menuliskan bahwa konflik terdiri atas dua jenis, yang pertama dimensi vertikal yaitu terjadi antara elite pengambil kebijakan dan massa (rakyat), kedua konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan karena beberapa hal, konflik vertikal disebabkan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, contohnya korupsi di tingkat pemerintahan, dan ketidakadilan hokum, sedangkan konflik horizontal terjadi disebabkan masalah perbedaan ras, agama, suku, budaya, dan kecemburuan sosial.

Dalam buku yang sama mengatakan bahwa konflik tidak hanya memberikan dampak yang negatif tetapi juga memiliki dampak positif, namun fungsi positif tersebut terjadi apabila memang dikelola dan di ekspresikan sewajarnya, sehingga disimpulkan dampak dari konflik tergantung apakah konflik tersebut memiliki sifat destruktif atau bersifat konstruktif. Konflik destruktif akan membuat kehancuran pada semua sisi terutama pada tata sosial dan fisik, konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan didalamnya, dampak dari konflik destruktif diantaranya ialah korban luka, korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana sosial, kerugian materil, serta keretakan dan kehancuran hubungan sosial, sedangkan konflik konstruktif muncul karna adanya peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh

pihak berkonflik, adapun dampak positif lainnya dalam konflik sosial yakni menciptakan dan memperkuat identitas kelompok sosial.

Sumarto (2012) menjelaskan bahwa konflik pertanahan terjadi akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait yang disebabkan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dijelaskan kasus pertanahan ialah yang meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan dalam Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam mencapai penanganan, penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional. Definisi dari Sengketa pertanahan ialah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, dampak yang tidak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan, sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa, sedangkan konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan yang terjadi antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis, lain halnya dengan Perkara Pertanahan yang berarti perselisihan

pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan BPN RI.

## G. Perubahan Kondisi Ekonomi Penduduk

### 1. Mata Pencaharian Penduduk

Sutanto. Phil. Astrid S. (1985), mata pencaharian adalah pekerjaan pokok atau sampingan yang dilakukan manusia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup) dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik, dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya.

Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan, mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup, sistem mata pencaharian merupakan produk dari manusia sebagai homo economicus menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum terus meningkat. Kehidupan manusia pada tingkat *food gathering* memang sama dengan binatang, tetapi dalam tingkatan *food producing* terjadi kemajuan yang sangat pesat karena pada tingkat ini manusia telah mengenal bercocok tanam, beternak, mengusahakan kerajinan dan lain-lain.

Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan fisik dan sosial ekonomi, aktivitas manusia

berbeda beda pada tiap golongan sesuai dengan kemampuan penduduk dan tata geografi daerahnya, perubahan mata pencaharian bisa terjadi secara terpaksa maupun sadar karna ada penekanan dari faktor internal ataupun eksternal, seperti pembangunan untuk pemukiman yang menyebabkan pergeseran lahan pertanian ke non pertanian, menyempitnya lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan menyebabkan penduduk yang bermata pencaharian petani mengalihkan kegiatannya dari sektor pertanian ke non pertanian, adapun klasifikasi jenis jenis pekerjaan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut.

a. Golongan Pegawai Negeri

Mereka yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat yang ditentukan mendapatkan tugas dan di berikan upah atau gaji menurut peraturan-perundang undangan yang berlaku, pegawai negeri dibagi menjadi dua yaitu pegawai negeri sipil dan TNI, POLRI.

b. Golongan Pedagang

Ialah mereka yang memiliki bidang usaha kecil atau besar ataupun perusahaan, dalam dalam arti luas yaitu usahawan dan *businessman* dan dalam arti sempit yaitu seseorang yang memiliki kerja menjual dan membeli barang atau jasa.

c. Golongan Petani

Ialah mereka yang pendapatannya berasal dari hasil cocok tanam sawah atau ladang.

d. Golongan Buruh

Ialah mereka yang bekerja dengan jasa seperti buruh bangunan atau pabrik.

Menurut penelitian yang dilakukan Puryantoro, Sulistyningsih (2012) petani yang menjual lahan mereka rata-rata kehilangan penghasilan mereka hingga nol rupiah pertahunnya dan hasil dari penjual lahan pertanian lebih banyak digunakan untuk kepentingan seperti biaya hidup, biaya beli rumah baru.

Seorang petani ketika kehilangan tanahnya maka ia juga akan kehilangan pekerjaannya, sebagian besar petani baik yang berada di desa maupun kota memiliki jenjang pendidikan yang rendah sehingga ketika tanah mereka beralih fungsi maka pekerjaan mereka pun tidak akan jauh dari sektor informal atau non pertanian, maka dari itu tanah bagi petani adalah lambang kekuasaan mereka, semakin sempitnya lahan pertanian akibat konversi lahan membuat petani harus mencari akal agar mereka bisa dapat bertahan hidup, akibatnya banyak petani yang beralih profesi menjadi pedagang, buruh, dan sebagainya tetapi juga banyak dari mereka yang tetap bertahan menjadi petani untuk musim tertentu.

## 2. Pendapatan

Pada dasarnya manusia melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatan diartikan sebagai upah yang di dapatkan dari hasil kerja yang ia dapatkan dari pekerjaan pokok atau sampingan sebagai imbalan jasa atasnya.

Dalam Winardi (1995), pendapatan ialah hasil yang diterima berupa uang atau materi yang ia capai dari penggunaan kekayaan dan jasa, sedangkan

tingkat pendapatan ialah tingkat hidup atau taraf hidup yang dinikmati oleh seorang individu atau sekelompok keluarga didasarkan dengan penghasilan yang mereka peroleh atau dari sumber pendapatan lainnya.

Menurut Sukirno, S. (2000) pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut, dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit.

Todaro, M., Smith, I. I., Stephen, C. (2012), cara yang umum dalam mendeskripsikan Negara berkembang ialah dengan melihat pendapatan perkapitanya. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*OECD: Organization for Economic Cooperation and Development*) dan PBB memberikan klasifikasi dalam melihat berbagai Negara berdasarkan status perekonomiannya, namun pengklasifikasian yang dikenal secara luas diberikan oleh Bank Dunia (*World bank*) dalam sistem klasifikasi Bank Dunia, pada perekonomian dengan total populasi minimal minimal 30.000 jiwa diurutkan berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita, tingkat perekonomian tersebut dibedakan menjadi pendapatan rendah, pendapatan menengah bawah, pendapatan tinggi menurut OECD.

Secara umum negara berkembang adalah negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah-atas. Negara-negara ini

dikelompokkan berdasarkan daerah geografis mereka. Pada tahun 2000 didefinisikan Negara berkembang ialah negara yang memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar \$755. Sedangkan Negara berpendapatan menengah-bawah memiliki tingkat pendapatan antara \$756-\$2.995, dan negara berpendapatan menengah atas memiliki tingkat pendapatan antara \$2.996-\$9.265, sedangkan negara berpendapatan tinggi memiliki tingkat pendapatan 59.266 atau lebih.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan rumah tangga sebagai seluruh penerimaan yang di dapat setiap rumah tangga atau balas jasa faktor-faktor ekonomi, ada keterkaitan yang erat antara pendapatan, faktor produksi dan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, atau juga penghasilan total yang diperoleh dari sektor formal atau informal dan juga penghasilan subsistem dalam jangka waktu tertentu dan terhitung. Adapun rincian dari pendapatan ialah sebagai berikut:

- a. Pendapatan sektor formal, penghasilan yang sifatnya regular dan diterima sebagai balas jasa seperti upah, gaji, dan hasil investasi
- b. Pendapatan sektor non formal seperti keuntungan penjualan atau sewa menyewa
- c. Pendapatan subsistem apabila produksi dan konsumsi terletak pada satu orang atau masyarakat kecil seperti hasil pertanian

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Definisi lain dari

pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan, biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan, dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi, pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relatif.

Dalam Winarso, B. (2012). Dijelaskan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan yang berbasis lahan pertanian salah satunya ditentukan oleh seberapa besar tingkat penguasaan lahan, semakin besar lahan yang dikuasi maka pendapatannya akan relatif lebih tinggi. Dalam Panel Pertanian Nasional (PATANAS) tahun 2010 yang menggunakan Indeks Gini sebagai indikator tingkat ketimpangan, luas penguasaan lahan pertanian di beberapa desa menunjukkan pada umumnya tergolong merata sampai agak timpang, terdapat hubungan antara tingkat penguasaan lahan dengan pendapatan hasil usaha tani yang menunjukkan distribusi pendapatan yang dikaitkan dengan luas kepemilikan tanah, semakin besar luas kepemilikan lahan semakin besar pula pendapatan rata-rata rumah tangga.

#### H. Penelitian Yang Relevan

Jurnal penelitian Danapriatna, N., dan Panuntun, Y. U. (2016). Dengan judul "Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani.

(Kasus di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan petani untuk mengkonversi lahan pertanian dan pengaruh konversi lahan pertanian terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan wawancara mendalam kepada informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, responden penelitian dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan SPSS, uji statistik yang digunakan adalah tabulasi silang dengan uji statistik chi-square dan uji korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi petani melakukan konversi lahan adalah pengaruh pengusaha dan frekuensi kedatangan pengusaha, semakin besar luasan konversi lahan, pendapatan petani setelah melakukan konversi lahan menjadi berkurang, semakin banyak lahan yang dikonversi, tingkat kesejahteraan petani semakin menurun.

Dan pada jurnal penelitian Wahyukinasih, E. (2016) dengan judul “Sikap Masyarakat desa Palihan Terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Kulon Progo” pada penelitian ini Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan menggunakan trinalugasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Dalam melakukan analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan 3 sikap masyarakat desa Palihan terhadap rencana pembangunan bandara yakni setuju, tidak setuju dan netral, sikap tersebut dinilai dari pandangan, alasan, serta tindakan yang dilakukan masyarakat. (1) Alasan masyarakat yang setuju dan netral mengatakan kebijakan pembangunan bandara

harus diwujudkan karena merupakan program pemerintah sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki pandangan kebijakan pembangunan bandara harus dibatalkan karena dirasa tidak adil untuk petani. (2) Alasan masyarakat yang setuju bahwa pembangunan bandara dapat memberikan dampak yang positif, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki alasan bahwa pembangunan bandara akan memberikan dampak yang negatif, sedangkan masyarakat netral setuju dengan alasan terpaksa. (3) Tindakan masyarakat yang setuju ialah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, sedangkan masyarakat yang tidak setuju melakukan penolakan dan tidak bersedia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim, dan masyarakat netral lebih memilih untuk diam.

Pada jurnal Prianggoro, A. A., Kurniawan, A. (2016). Dengan judul “Persepsi Masyarakat Dan Potensi Reorientasi Usaha Berkaitan Dengan Pembangunan Bandara Internasional Di Kulon Progo” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengambilan data menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 76% responden memiliki persepsi positif terhadap pembangunan bandara, dalam persepsi pembangunan maupun persepsi usaha, zona satu dan dua memiliki kecenderungan persepsi yang tinggi dibandingkan dengan zona tiga. 67% masyarakat masih memiliki minat usaha yang rendah dalam membuat usaha baru, masyarakat tertarik menggeluti jenis usaha warung, toko kelontong, dan lainnya dari sisi stakeholder, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan usaha.

Pada jurnal Irawan, B. (2016). Mengenai “Meningkatkan Efektifitas Kebijakan Konversi Lahan”. Data diperoleh dari Sensus Pertanian 2003 dan Badan Pusat Statistik dengan mendeskripsikan peraturan pemerintah mengenai upaya pengendalian konversi lahan sawah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan yang selama ini dilaksanakan memiliki berbagai kelemahan sehingga dalam penerapan kebijakan tidak dilakukan secara konsisten, kebijakan tersebut perlu dirumuskan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) orientasi kebijakan hendaknya tidak hanya terfokus pada melarang konversi lahan sawah tetapi lebih diarahkan pada upaya menekan dan menetralkan dampak negatif konversi lahan, (2) obyek kebijakan konversi lahan sawah mestinya dirumuskan berdasarkan lahan pertanian bukan berdasarkan jenis lahan pertanian, (3) pengendalian konversi lahan jangan hanya mengandalkan instrumen yuridis tetapi perlu dukungan instrumen ekonomi dilengkapi dengan sanksi pelanggaran yang jelas, (4) implementasi kebijakannya perlu dilaksanakan secara sentralistis dan jika dilaksanakan desentralistis maka pemerintah pusat perlu mengembangkan instrumen ekonomi yang dapat mendorong implementasi kebijakan konversi lahan secara konsisten, dan (5) meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan konversi lahan kepada masyarakat luas yang meliputi potensi dampak negatif konversi lahan.

Pada jurnal penelitian Puryantoro, Sulistyaningsih (2012) dengan judul “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Pendapatan Petani Di desa Landangan Kecamatan Kapongan” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pendapatan petani pemilik lahan akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, alat uji menggunakan uji peringkat bertanda *wilcoxon* (

*Wilcoxon Signed Rank Test* ). Setelah penjualan lahan Pendapatan petani menjadi nol, dari hasil penelitian diperoleh data jika uang hasil penjualan tidak dijadikan modal usaha namun digunakan untuk biaya hidup sehari hari, sebelum petani menjual lahan pendapatan rata-rata per ha/tahun mencapai Rp 5.668.384,62 sementara setelah lahan tersebut dialihkan menjadi lahan non pertanian rata-rata pendapatan petani hanya Rp 3.126.923,00 hasil analisa uji peringkat bertanda wilcoxon menyatakan bahwa pendapatan petani antara sebelum dan sesudah menjual lahan berbeda nyata pada tingkat keyakinan 95%. Hipotesis diterima “Pendapatan petani mengalami penurunan setelah mengalihfungsikan lahan”. Dengan demikian pengalihan fungsi lahan berpengaruh pada pendapatan petani.

Dewi, I. L., Sarjana, I. M., dan pardnyawathi, N. M. (2016), dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Bagi Anggota Subak Kerdung Di Kota Denpasar”. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, sampel dipilih secara *purposive*, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pertumbuhan Kota Denpasar berdampak negatif terhadap lahan pertanian, pertumbuhan Pembangunan di kota merupakan penyebab utama konversi fungsi lahan basah, berdasarkan hasil penelitian, dampak sosial yang dirasakan petani di Subak kerdung adalah berkurangnya pasokan air karena hancurnya saluran air akibat konstruksi perumahan di lahan pertanian banyak limbah rumah tangga yang dibawa ke saluran air dan menyumbat saluran air yang menyebabkan limbah rumah tangga dan pencemaran air akibat industri tekstil, dampak ekonomi alih fungsi lahan sawah ialah pada perubahan mata pencaharian baru selain sebagai petani yaitu supir lepas, pedagang, kos-kosan, tukang parkir,

dan penggilingan beras. Dampak sosial alih fungsi lahan sawah ialah terputusnya saluran irigasi, banyaknya sampah plastik rumah tangga masuk areal sawah, kualitas dan kuantitas air irigasi sangat rendah, terganggunya pola taman, konflik sosial, dan melemahnya nilai-nilai budaya subak.

Pada jurnal penelitian Soemarwoto, O. (2013) dengan judul “Dampak Industri Batubara Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara” metode yang dipergunakan adalah penelitian verifikatif, digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan objek atau peristiwa dengan maksud membuktikan kebenaran hipotesis, analisis verifikatif berguna untuk menguji adanya pengaruh dampak industri batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat, untuk mengetahui hubungan variabel tersebut, dapat dilakukan dengan uji analisis dampak, serta teknik *Sampling quota*. Berdasarkan dari hasil penelitian pola perkembangan penduduk, industri batubara positif memberikan dampaknya, sedangkan Pola perkembangan ekonomi berdasarkan dari hasil tanggapan responden serta hasil penghitungan rasio beban tanggungan dengan hasil 4,15% maka indikator pola perkembangan ekonomi, industri batubara positif memberikan dampaknya, pada indikator penyerapan tenaga kerja hasilnya negatif karena dengan adanya industri batubara tidak banyak bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat, berdasarkan struktur ekonomi untuk indikator ini, hasilnya negatif karena adanya industri batu bara tidak mengurangi jumlah pengangguran, lain halnya pada pendapatan masyarakat berdasarkan tanggapan responden 59,46% meningkat serta dari hasil penghitungan nilai pendapatan mencapai Rp. 3.000.000/orang, sehingga hasilnya positif karena

dengan adanya industri batubara pendapatan masyarakat juga meningkat, pada perubahan lapangan kerja berdasarkan tanggapan responden 60,89% berubah serta jika ditinjau dari hasil penghitungan nilai pendapatan perkapita Rp. 9.000.000/tahun, untuk indikator ini hasilnya positif. Hasil pengujian hipotesis menyatakan 2 indikator kurang berdampak dari 5 indikator menyatakan sangat terdampak, dengan demikian dapat dilihat hasil hipotesis yang menyatakan ada dampak industri batu bara terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Pada jurnal penelitian pertanian terapan Winarso, B. (2012). Dengan judul “Dinamika pola penguasaan lahan sawah di wilayah pedesaan di Indonesia”. Data yang dijadikan acuan penelitian ialah data dari penelitian PATANAS (Panel Petani Nasional) Tahun 2007 dan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, dilakukan pada 14 desa produksi padi sawah pada lima propvinsi di Jawa dan luar Jawa, tiap tiap desa diambil 40 responden, baik petani maupun non petani. Diperoleh hasil bahwa perkembangan kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan khususnya lahan pertanian cenderung semakin sempit, terutama pada desa produksi padi, hal ini menyebabkan pola kepemilikan lahan yang cenderung semakin beragam. Pengaruh lainnya ialah pendapatan petani yang disebabkan pola kepemilikan lahan, semakin meningkatnya petani non lahan dan petani petani berlahan sempit hal tersebut akan membawa dampak sosial ekonomi bagi keluarga petani. Dalam periode 2007 – 2010 terjadi peningkatan jumlah responden yang tidak memiliki lahan, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

Pada jurnal internasional Mbaiwa, J. E. (2003). Dengan judul “Peningkatan Pariwisata Dan Dampak Sosio-Ekonominya Di Delta Okavango, Botswana”. Jurnal ini berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan antara Januari 2001 dan Juli 2002. Data yang diperoleh berasal dari sumber primer dan sekunder, namun sebagian besar menggunakan data sekunder yang berpusat pada penggunaan literature, pengumpulan data primer diperoleh dari pengelola yang berpusat pada isu-isu kepemilikan fasilitas pariwisata, kesempatan kerja dan tunjangan gaji. Wawancara informal dilakukan kepada pemerintah pusat di Dewan Distrik Utara Barat, pariwisata di Delta Okavango didominasi oleh pihak asing yang menyebabkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan dimana orang asing berkeinginan memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat dengan mengorbankan lingkungan, pada tingkat makro ekonomi, pertumbuhan pariwisata di Delta Okavango memberikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut kontribusi pariwisata terhadap PDB, dampak lainnya ialah pada pekerjaan, tingkat pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor lainnya, pariwisata di Delta Okavango telah mempengaruhi terbentuknya sarana wisata seperti kamp, pondok, transportasi, industri grosir, dampak lainnya ialah pada pembangunan infrastruktur pada bidang pariwisata yang mempengaruhi perekonomian dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur, dampak lainnya ialah pada pembangunan pedesaan dimana pariwisata memberikan dorongan bagi industri dan industri lokal, juga pertanian. Pertumbuhan industri pariwisata di Delta Okavango telah berdampak pada pembentukan beberapa bisnis terkait pariwisata di distrik Ngamiland, dampak yang terakhir ialah dampak pariwisata terhadap

lingkungan yang mana pariwisata memberikan benih kehancurannya, pariwisata bisa menghancurkan lingkungan, sebagian besar memberikan tekanan tambahan pada sumber daya lingkungan, mengorbankan prospek masa depan penduduk lokal.

Pada jurnal Penelitian Huang, B., Zhang, L., dan Wu, B. (2009). Dengan judul “Analisis spatiotemporal konversi lahan pedesaan-perkotaan” penelitian dilakukan di New Castle County, di Negara Bagian Delaware, penelitian menggunakan metode perbandingan untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan antara dua waktu berbeda, perangkat lunak ArcGIS digunakan untuk mengkompilasi variabel prediktor. Penelitian ini menggunakan regresi logistic, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penggunaan lahan, data demografi, dan data jaringan transportasi selama tiga periode waktu, 1984-1992, 1992-1997, dan 1997-2002. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahan ialah kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalan, penggunaan lahan di sekitarnya, perumusan kebijakan pembangunan perkotaan diperlukan dikarenakan terjadi perubahan kepadatan penduduk pada daerah di ujung pembangunan kota yang dikarenakan ekspansi pembangunan dikarenakan jumlah penduduk yang banyak, konversi lahan terjadi di daerah yang mengalami urbanisasi yang disebabkan kondisi sosial ekonomi, kepadatan penduduk dan jarak tempuh secara positif mempengaruhi konversi lahan pedesaan-perkotaan, kepadatan penduduk dan lingkungan perkotaan secara konsisten signifikan dari waktu ke waktu, sebagian besar konversi lahan pedesaan-perkotaan cenderung terjadi di daerah kepadatan tinggi, eksternalitas negatif dapat mendorong pembangunan dari daerah perkotaan sehingga diperlukan kebijakan zonasi untuk mengendalikan pembangunan

perkotaan yang menuju pada pedesaan, peningkatan kepadatan pembangunan dapat menimbulkan kerugian, agar pembangunan tidak merusak keadaan sosial maka pembangunan seharusnya tidak dilakukan dekat dengan pemukiman agar terhindar dari memburuknya lingkungan hidup, efek negatif dari variabel jarak perjalanan mencerminkan fakta bahwa transportasi Infrastruktur bertindak sebagai kekuatan sentrifugal untuk ekspansi urbanisasi menuju daerah pinggiran kota dan daerah terpencil, dengan perkembangan transportasi jaringan dan sarana transportasi yang lebih murah, terutama mobil pribadi yang terjangkau.

Hubungan penelitian terdahulu pada variabel yang di teliti menunjukkan hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya yang digunakan untuk menentukan hipotesis awal, hubungan penelitian terdahulu pada variabel dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pola kepemilikan lahan

Alih fungsi lahan dalam Abiasti, F. S. (2011), memiliki pengaruh signifikan pada pola kepemilikan lahan sebelum dan sesudah terjadi perubahan penggunaan lahan, perubahan yang paling nyata ialah petani yang awalnya mengusahakan lahannya sendiri kini menjadi petani penyewa dan penyakap.

2. Perubahan tingkat kesejahteraan

Alih fungsi lahan dalam Danapriatna, N., dan Panuntun, Y. U. (2016), memiliki pengaruh signifikan pada perubahan kesejahteraan petani hal ini disebabkan hilangnya lahan petani yang menghilangkan pendapatan serta menurunnya tingkat konsumsi petani.

### 3. Interaksi sosial

Alih fungsi lahan dalam Abiasti, F. S. (2011), memiliki pengaruh signifikan pada interaksi sosial sebelum dan sesudah terjadi perubahan penggunaan lahan, interaksi sosial menurun setelah adanya perubahan penggunaan lahan, ditandai dengan jadwal pertemuan dan kerja bakti warga yang sudah jarang dilaksanakan

### 4. Konflik pemanfaatan lahan

Alih fungsi lahan dalam Sopanudin, A. (2016), memiliki pengaruh yang signifikan pada konflik pemanfaatan lahan setelah dimulainya pembangunan, konflik terjadi disebabkan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama hilang disebabkan pembangunan bandara, hal ini menyebabkan munculnya sikap pro dan kontra di masyarakat yang menimbulkan konflik sosial.

### 5. Perubahan mata pencaharian

Alih fungsi lahan dalam Ramadhan, A. C., Rahdriawan, M. (2011), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mata pencaharian petani yang mana membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka sebagai petani dan harus mencari pekerjaan lainnya untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

### 6. Pendapatan

Alih fungsi lahan dalam Puryantoro, Sulistyaningsih (2012), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani yang mengakibatkan

penurunan bahkan hilangnya pendapatan petani dari hasil usaha tani, dengan rata-rata kehilangan penghasilan mereka hingga 0 nol rupiah.

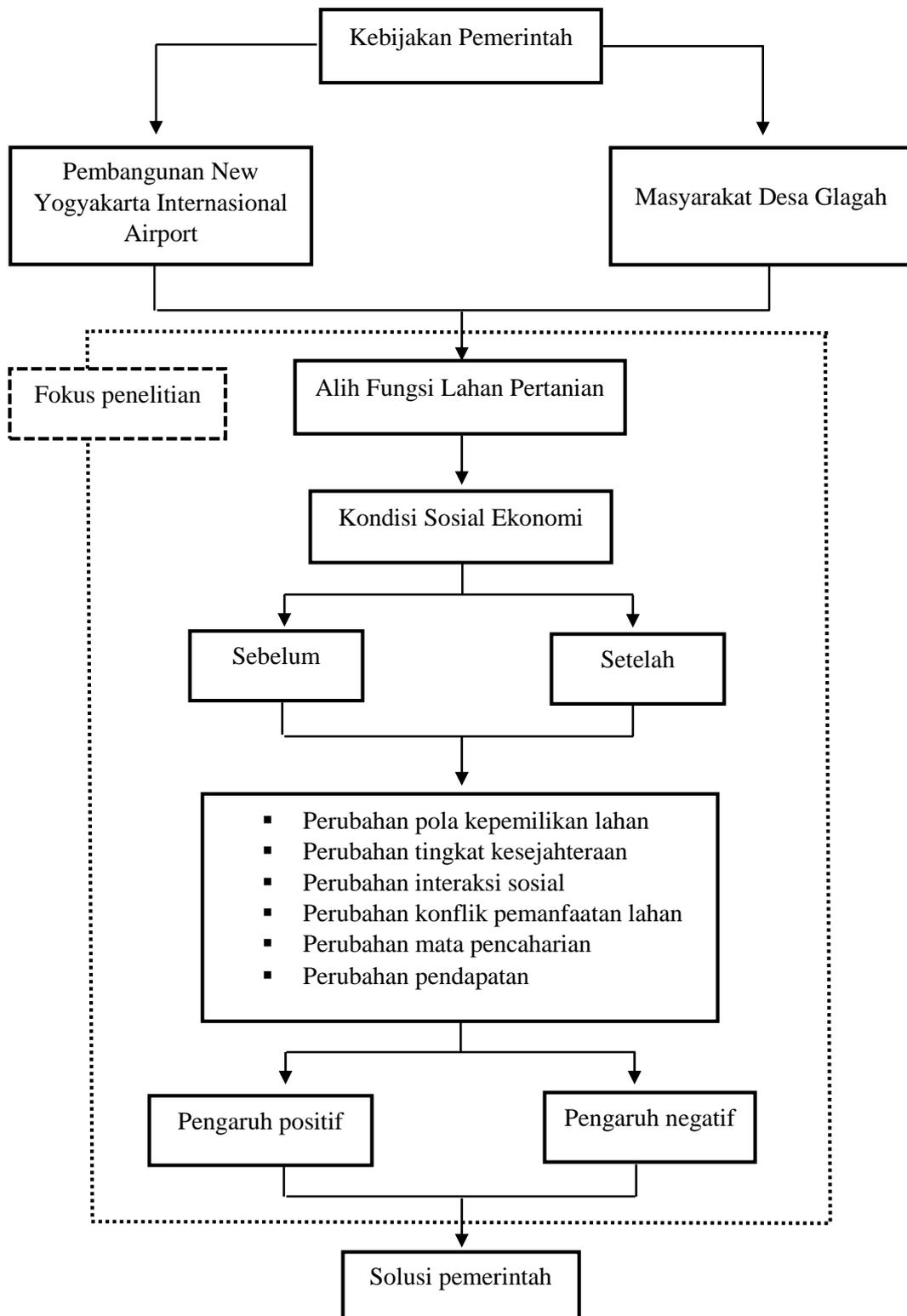
## I. Kerangka Berfikir

Kebutuhan manusia dari waktu ke waktu selalu meningkat, daerah perkotaan yang telah padat memaksa pembangunan dilakukan di pinggiran kota yang masih memiliki lahan yang luas. Pembangunan kota sendiri di tandai dengan munculnya perumahan baru, industri ataupun fasilitas-fasilitas sosial seperti bandara yang ada di kabupaten Kulon Progo yang tentunya memerlukan lahan untuk pembangunannya.

Pembangunan bandara internasional diasumsikan memberikan perubahan pada alih fungsi dan penggunaan lahan yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat, pembangunan ini menyebabkan adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang mana berdampak pada perubahan mata pencaharian, apabila ada ketidaksiapan dari petani menghadapi perubahan ini maka petani akan kehilangan lapangan pekerjaan karna tak memiliki keahlian selain bertani, hal ini menyebabkan naiknya tingkat pengangguran, perubahan fungsi lahan sendiri dipastikan akan mengurangi cadangan padi dikarenakan hilangnya lahan pertanian produktif.

Pembangunan bandara menyebabkan alih fungsi pada lahan pertanian maupun non pertanian yang mana berpengaruh pada sosial ekonomi petani yang meliputi pola kepemilikan lahan, perubahan kesejahteraan, interaksi sosial, konflik pemanfaatan lahan, perubahan mata pencaharian, dan pendapatan. Setiap

pembangunan selalu memberikan dampak positif maupun negatif yang selalu ada, disinilah peran pemerintah memberikan solusi bagi keputusan pembangunan yang dibuatnya, karna pada dasarnya fungsi dari pembangunan sendiri ialah perubahan keadaan yang kurang menguntungkan ke keadaan yang lebih baik, oleh karna itu pembangunan dilakukan berdasarkan pendekatan kemanusiaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat pengaruh dampak pembangunan bandara pada sosial ekonomi petani terdampak maka dapat dilihat pada diagram aliran berikut ini:



**Gambar 1** Kerangka Berfikir

## J. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan awal untuk melihat apakah dugaan tersebut diterima atau ditolak.

### 1. Perubahan pola kepemilikan lahan

Terjadi perubahan signifikan pada pola kepemilikan lahan setelah terjadinya alih fungsi lahan

### 2. Perubahan tingkat kesejahteraan

Terjadi perubahan signifikan pada tingkat kesejahteraan setelah terjadinya alih fungsi lahan

### 3. Perubahan interaksi sosial

Terjadi perubahan signifikan pada interaksi sosial setelah terjadinya alih fungsi lahan

### 4. Konflik pemanfaatan lahan

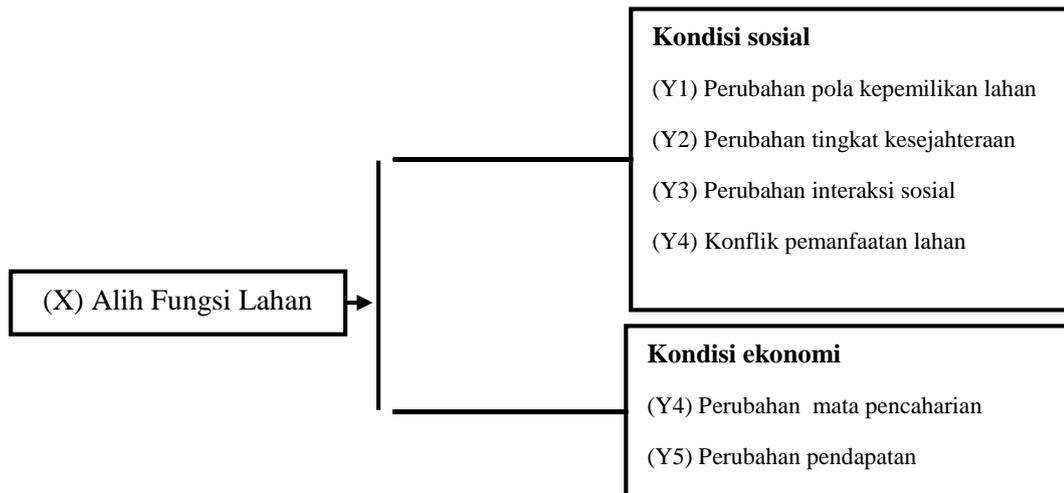
Terjadi perubahan signifikan pada konflik pemanfaatan dan setelah terjadinya alih fungsi lahan

### 5. Perubahan mata pencaharian

Terjadi perubahan signifikan pada mata pencaharian pokok dan sampingan setelah terjadinya alih fungsi lahan

### 6. Perubahan tingkat pendapatan

Terjadi perubahan signifikan pada tingkat pendapatan setelah terjadinya alih fungsi lahan



**Gambar 2**  
Hipotesis Penelitian